

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah berhak dan berkewajiban untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Sudah tentu Pemerintah Daerah memerlukan pemasukan dan pengeluaran agar roda pemerintahan tetap berjalan. Salah satunya dengan pengefektifan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di dalam APBD terdapat Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Besarnya kontribusi PAD dalam APBD merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Faisal, 2010).

Wilayah Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten dan kota yang mempunyai laju ekonomi bervariasi. Berdasarkan data dan informasi dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah (BPS Jateng), laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka tahun

2017, realisasi PAD pada tahun anggaran 2016 terhimpun sebesar 19,63 trilyun rupiah naik 16,6 persen dibandingkan tahun anggaran 2015. Lima kabupaten atau kota yang mempunyai PAD tertinggi di atas rata-rata berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 yaitu Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Brebes,

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak daerah dan Retribusi Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kontribusi pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 9,67 trilyun atau sebanyak 49,27 % dari total pendapatan asli daerah pada tahun 2016.

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten atau kota. pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan dan reklame, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan

bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Penelitian ini akan menggunakan variabel pajak daerah sebagai variabel independen. Dari beberapa sumber pajak daerah yang ada, penelitian ini hanya menggunakan variabel yang terjadi ketidakkonsistenan pada peneliti-peneliti sebelumnya. Terdapat tiga bagian dari pajak daerah yang memiliki ketidakkonsistenan hasil penelitian. Diantaranya yaitu pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir. Dasar pengambilan variabel ini disebabkan karena adanya perbedaan hasil penelitian. Pajak hotel menurut Wulandari (2016) dan Widodo (2017) berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan menurut Nikmah (2017) dan Rizqiyah (2014) berpengaruh negative terhadap PAD. Pajak Reklame menurut Wulandari (2016) berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan menurut Nikmah (2017) dan Rizqiyah (2014) berpengaruh negative terhadap PAD. Pajak Parkir menurut Mufidah (2017) berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan menurut Wulandari (2016) dan Rizqiyah (2014) berpengaruh negative terhadap PAD.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata tahun 2016, kondisi kepariwisataan nasional tahun 2016 secara makro menunjukkan perkembangan dan kontribusi yang terus meningkat dan semakin signifikan terhadap PDB nasional sebesar 4,03% atau senilai Rp. 500,19 triliun, dengan peningkatan devisa yang dihasilkan mencapai Rp 176 -184 triliun dan tenaga kerja pariwisata sebanyak 12 juta orang. Pertumbuhan usaha

akomodasi memiliki hubungan timbal balik yang berkaitan erat dengan perkembangan sektor pariwisata. Potensi sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dari pertumbuhan usaha akomodasi sebagai unsur penunjang pariwisata di Jawa Tengah yang menjamur. Daerah dengan panorama yang indah dengan suhu yang relatif dingin menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlama-lama di area wisata tersebut dengan memanfaatkan moda akomodasi untuk menginap. Pengaruh variabel pajak pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah disebabkan oleh semakin meningkatnya tempat penginapan/hotel di Provinsi Jawa Tengah (Riskhi, 2017)

Dengan asumsi tersebut, maka pendapatan dari akomodasi tersebut meningkat sehingga pendapatan pajak hotel juga harusnya meningkat. Namun pada kenyataannya masih ada hasil dari para peneliti yang menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Seperti pada penelitian Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009 – 2013) oleh Iftakhur Rizqiyah yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh negative terhadap pendapatan asli daerah.

Pengembangan usaha dengan bentuk iklan dan promo perlu dijadikan fokus utama pada sektor industri ekonomi jaman sekarang. Obyek pajak reklame akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan perusahaan atau industri (Nurmayasari, 2010). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi

Jawa Tengah, jumlah perusahaan pada tahun 2014 sebanyak 3.666. Jumlah ini meningkat pada tahun 2015 yaitu sebanyak 4.378 perusahaan. Reklame sangat di perlukan oleh perusahaan terutama pada bagian pemasaran, karena dengan adanya reklame masyarakat bisa tahu mengenai produk-produk maupun promo yang sedang ada di perusahaannya. Maka dari itu pemerintah perlu memerhatikan peluang tersebut sebagai upaya peningkatan jumlah pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah. Namun tak jarang kita melihat reklame tidak lunas pajak di kota-kota besar di Provinsi Jawa Tengah. Di Kota Semarang contohnya berdasarkan data Dinas PJPR Kota Semarang, setidaknya ada 1.500 reklame di wilayah itu yang tercatat resmi meski banyak pemilik reklame yang belum menaati peraturan mengenai pembayaran retribusi dan pajak.

Pemanfaatan penerimaan pendapatan daerah pada sektor pajak reklame ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Jika hal ini bisa dikelola dengan baik, pajak reklame juga akan ikut berkontribusi positif seperti pajak hotel. (Asriyawati, 2014). Selain itu, hasil penelitian dari berbagai penelitian menyatakan bahwa pajak reklame menurut Wulandari (2016) berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan menurut Nikmah (2017) dan Rizqiyah (2014) berpengaruh negative terhadap PAD. Keadaan seperti ini yang membuat pajak reklame perlu di teliti lagi.

Banyaknya kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah tercatat sebanyak 15,07 juta unit pada tahun 2016, jumlah ini naik 0,31 persen dibanding tahun 2015 yaitu sebanyak 15,11 juta unit . Kendaraan

bermotor terbanyak adalah jenis Sepeda motor yang mencapai 13,24 juta unit. Secara otomatis kebutuhan akan lahan parkir sangatlah besar seiring dengan makin banyaknya jumlah kendaraan. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Fenomena yang sering kita temui di lingkungan sekitar yaitu banyaknya kendaraan yang parkir entah itu di lahan khusus parkir maupun parkir liar.

Pajak parkir sendiri berada di urutan 8 dalam memberikan pemasukan terhadap Pajak Daerah. Ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Fadillah, 2015). Pajak Parkir menurut Mufidah (2017) berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan menurut Wulandari (2016) dan Rizqiyah (2014) berpengaruh negative terhadap PAD. Ketidakkonsistenan hasil penelitian ini perlu dikaji ulang. Maka dari itu, pajak parkir ini perlu dibuktikan kembali sudah efektifkah pengelolaan pajak parkir di wilayah Jawa Tengah karena melihat potensinya yang lumayan bisa meningkatkan pajak daerah.

Berdasarkan data dan fenomena diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2016).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pajak hotel secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2016?
2. Bagaimana pengaruh pajak reklame secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2016?
3. Bagaimana pengaruh pajak parkir secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2016?
4. Bagaimana pengaruh pajak hotel, pajak reklame, dan pajak parkir secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pajak hotel secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2016?
2. Untuk menganalisis pengaruh pajak reklame secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2016?

3. Untuk menganalisis pengaruh pajak parkir secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2016?
4. Untuk menganalisis pengaruh pajak hotel, reklame, dan pajak parkir secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2016?

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang pengaruh pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2016. Serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat dan tertarik terhadap penelitian sejenis.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan pengelolaan pajak daerah terutama pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

3. Bagi masyarakat luas

Untuk memberi wawasan bagi pembaca khususnya masyarakat luas mengenai informasi pajak daerah terkhusus pajak hotel, pajak reklame, dan pajak parkir di Provinsi Jawa Tengah serta pengetahuan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

4. Bagi peneliti

Sebagai wahana untuk membuktikan teori yang telah diperoleh selama dibangku kuliah ke dalam praktik di dunia nyata. Sekaligus menambah pengetahuan tentang pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada umumnya serta mengenai pengaruh pajak hotel, pajak reklame, dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang definisi beserta penjelasan mengenai *teori Stewardship*, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Secara Umum, Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir,

Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat & waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis & sumber data, metode pengumpulan data, operasional variabel penelitian dan model analisis data.

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan deskripsi mengenai objek penelitian berupa deskripsi variabel-variabel berkaitan dengan masalah penelitian, analisis data berupa interpretasi data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan pembahasan secara luas dari hasil interpretasi data.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait.